



PENGELOLAAN SAMPAH DARI WASTE4CHANGE TERKAIT PERMASALAHAN SAMPAH DI DKI JAKARTA

Fitria Yuliani

Prodi Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract: *Garbage accumulation that occurred in Indonesia, make a lot of problems that arise. This is also due to lack of information, education and government firmness in enforcing this waste policy. We never know and care where the waste we produce is carried and managed; whether the waste is recycled, or become a disaster for others. When the government is able to firmly enforce the waste, and also cooperate with the community related to the processing of waste then slowly but surely the problem of garbage pileup is no longer the case. With education processing done it can also be an economic land for housewives and other communities when the wise community in doing waste processing. Many innovations have been done by the government and also the community to reduce the existing waste problems.*

Keywords: *Garbage, Waste4change, Jakarta*

Abstrak: Penumpukan sampah yang terjadi di Indonesia, membuat banyak permasalahan yang timbul. Hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya informasi, edukasi serta ketegasan pemerintah dalam menegakkan kebijakan sampah ini. Kita tidak pernah tahu dan peduli kemana sampah yang kita hasilkan dibawa dan dikelola; apakah sampah tersebut didaur ulang, atau menjadi bencana bagi orang lain. Bila mana pemerintah mampu tegas dalam menegakkan sampah, dan juga bekerjasama dengan masyarakat terkait dengan pengolahan sampah maka dengan perlahan namun pasti persoalan soal penumpukan sampah tidak lagi terjadi. Dengan pendidikan pengolahan yang dilakukan hal tersebut juga dapat menjadi lahan ekonomi bagi ibu rumah tangga maupun masyarakat lainnya bila mana masyarakat bijak dalam melakukan pengolahan sampah. Banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk mengurangi masalah sampah yang ada selama ini.

Kata Kunci : Sampah, Waste4change, Jakarta

PENDAHULUAN

DKI Jakarta merupakan Ibukota Indonesia yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian berlangsung, karena status itulah DKI Jakarta menjadi tujuan dari daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Setiap tahunnya jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat, peningkatan jumlah penduduk pastinya dibarengi dengan peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh warganya, baik itu kegiatan industri, perusahaan ataupun kegiatan rumah tangga. Dari berbagai macam kegiatan yang ada pastinya memberikan dampak, terlebih dampak negatif yang menjadi permasalahan bagi DKI Jakarta.

Salah satu permasalahan yang belum bisa ditangani dengan baik oleh pemprov DKI Jakarta adalah permasalahan sampah. Setiap harinya DKI Jakarta menghasilkan sampah seberat 7000 ton yang langsung dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini menjadi permasalahan yang serius, selain kuota yang berlebihan menimbulkan keluhan dari pengelola TPA Bantargebang juga masyarakat sekitar TPA, hal ini juga membuat citra kota DKI Jakarta menjadi buruk. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan dan digunakan lagi setelah berakhirnya suatu proses.

Sampah menjadi hal serius jika tidak ditangani dengan baik. Di DKI Jakarta telah melakukan pemilahan sampah dengan membedakan tempat sampah menjadi tiga yaitu organik, anorganik dan bahan beracun. Namun pada tahap pengangkutan sampah-sampah tersebut dijadikan satu kembali oleh petugas PPSU, hal ini menyebabkan sia-sianya pembedaan dan pemilahan sampah yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan sampah Pemprov DKI Jakarta haruslah melibatkan masyarakat sebagai penghasil utama sampah untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan melibatkan masyarakat, secara tidak langsung Pemerintah juga mengedukasi masyarakat untuk merubah pola pikir dan kebiasaan buruk dalam hal pembuangan sampah. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan dan juga masyarakat, serta membentuk komunikasi yang baik juga maka semua permasalahan yang timbul akan dapat teratasi dengan baik. Sistem pengolahan sampah di DKI masih jauh dari kata baik, ini terbukri dari banyaknya

permasalahan yang timbul diantaranya penyumbatan saluran drainase, kotor/kumuh, pencemaran lingkungan (tanah dan udara) yang juga berdampak pada terjadinya banjir di daerah DKI Jakarta.

KAJIAN TEORI

Inovasi

Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2. Kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu

juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. Kemungkinan Dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet, memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Richard Heeks dalam LAN (2007:98) mengelompokkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Manfaat pada Tingkat Proses

- a. Menghemat biaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses keinformasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, mengurangi biaya bagi pemerintah untuk menyediakan inoformasi.
- b. Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan proses pertukaran datadengan instansi lain.
- c. Mengurangi keterbatasan: dimanapun, kapanpun informasi dan layananpemerintah dapat diakses oleh masyarakat.
- d. Keputusan yang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya,mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan.
- e.

2. Manfaat pada Tingkat Pengelolaan

- a. Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan meningkatkan interes rasional atau nasional. Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan terhadap masyarakat yang lebih setara dalam pelayanan publik.
- b. Merubah perilaku masyarakat: partisipasi yang lebih besar terhadap proses pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk ambil bagian dalam pelayanan pengadaan barang atau jasa.
- c. Pemberdayaan: meningkatkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, melalui kemudahan, akses ke informasi pemerintahan. Pemberdayaan aparatur lebih meningkat melalui akses ke informasi yang dibutuhkan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemberdayaan pemasok melalui akses ke informasi tentang pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer melalui akses ke informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat bisa menemukan masa depan yang lebih baik.

Istilah pemberdayaan merupakan istilah pinjaman yang berasal dari bahasa Inggris, "empowerment", akar katanya adalah "power" yang artinya kuat, kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan dimaknai sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membantu menyelesaikan masalah yang senyatanya menjadi kendala bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama (problem solving).
2. Mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

3. Menumbuhkan, memelihara dan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat agar tercipta keadilan dan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memberikan peluang kepada anggota masyarakat untuk menemukan potensi dirinya dan mengenali kendala-kendala dalam mengembangkan potensi tersebut.
5. Membangun image dalam masyarakat bahwa setiap individu anggota masyarakat merasa berguna dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain dan masyarakat.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) dalam Zubaedi (2007 : 99-100) kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat kompresif jika menampilkan lima karakteristik:

- a. Berbasis Lokal
- b. Berorientasi Pada Kesejahteraan
- c. Berbasis Kemitraan
- d. Bersifat Holistik
- e. Berkelanjutan

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (1997:216) mengembangkan ada delapan indikator pemberdayaan yang disebut dengan indeks pemberdayaan, antara lain:

- a. Kebebasan berpindahnya suatu individu untuk dapat pergi ke luar wilayah tempat tinggalnya
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil
- c. Kemampuan membeli komoditas besar
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan - keputusan rumah tangga
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protesprotes
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Menurut Suharto (2005:218-219) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan - pendekatan yang dapat disingkat menjadi 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan).

PEMBAHASAN

Dari masalah banyaknya sampah dan kurangnya cara pengelolaan yang baik Waste4Change membuat sebuah inovasi dalam cara pengelolaan sampah. Waste4Change adalah kewirausahaan sosial yang memberikan solusi terhadap permasalahan sampah, dengan prinsip perubahan perilaku dan pengelolaan yang bertanggung jawab dengan misi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab atas sampahnya. Waste4Change memiliki empat fokus usaha utama yakni antara lain *consult* (konsultasi, riset, dan studi pendahuluan mengenai sampah yang dihasilkan dan cara menanganinya), *campaign* (edukasi dan kampanye Bijak Kelola Sampah pada berbagai acara), *collect* (mengumpulkan sampah yang telah dipilah dan mengangkutnya secara berkala), dan *create* (memaksimalkan potensi barang dengan melakukan *recycling* dan *upcycling* untuk mengurangi beban di TPA).

Waste4Change adalah kewirausahaan sosial yang berdiri sejak tahun 2013 dan memberikan solusi terhadap permasalahan sampah, dengan prinsip perubahan perilaku dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dari hasil riset Waste4Change, data Dinas kebersihan DKI Jakarta & Kementerian Lingkungan Hidup RI ditemukan data bahwa sampah setiap hari yang dihasilkan di Jakarta saja lebih dari 6.000 ton, sama dengan berat 30 ekor paus biru dewasa. Sampah memiliki banyak dampak negatif, cairan yang dihasilkan sampah dapat mencemari lingkungan seperti air dan tanah, tumpukan sampah di sungai menyebabkan banjir, gunung sampah di TPA juga bisa mengakibatkan longsor, dan banyak lagi hal-hal buruk yang bisa ditimbulkannya.

Menurut data statistik Waste4Change, sekitar 90% masyarakat belum mengetahui mengenai pengolahan sampah. Sebagian besar masyarakat belum teredukasi secara baik untuk masalah pengolahan sampah, hal ini disebabkan kurangnya informasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan cara pengolahan sampah yang baik. Pemerintah memang telah membuat regulasi terkait penanganan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 5 tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan di Ibukota Jakarta dan Sistem Pungutan Retribusi serta Pengangkutan Sampah dari TPS ke Lokasi TPA.

Namun pada kenyataannya saat ini persoalan sampah belum juga dapat terselesaikan, jika harus menunggu kebijakan mengenai sampah di keluarkan oleh pemerintah maka dengan kurun waktu itu pula sampah akan semakin menumpuk di DKI Jakarta. Sementara untuk manfaat bak sampah/tempat sampah itu sendiri adalah sebagai tempat penampungan dari barang yang tidak terpakai lagi/sisa, baik itu berbahan plastik, kertas maupun sisa daun-daun kering jatuh berserakan di sekitar kita. Namun hal tersebut juga belum dapat berjalan secara maksimal.

Maka dari itu dengan berlandaskan Undang-Undang dan juga di sesuaikan dengan daerah yang akan di terapkan kebijakan terkait dengan pemanfaatan sampah tersebut, dengan kerjasama yang baik kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik dan tercapai akan segala cita-cita daerah tersebut. Selain itu juga pemberian informasi terkait permasalahan sampah harus disosialisasikan dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan sampah dapat terselesaikan dengan maksimal. Dengan melihat permasalahan yang terjadi maka kami membuat dan menawarkan beberapa pilihan untuk dapat mengurangi permasalahan penumpukan sampah tersebut.

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menyoroti kinerja dan sistem pengolahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan terkait permasalahan sampah.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini ialah:

1. Kurangnya edukasi bagi masyarakat dalam hal penanganan sampah di DKI Jakarta
2. Sistem pengolahan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang belum maksimal
3. Penyediaan sarana pra-sarana yang belum memadai
4. Kurang tegasnya regulasi yang ada dalam permasalahan sampah

Untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan dalam pemberian KIE oleh pemerintah tentang pengolahan sampah terhadap masyarakat DKI Jakarta
2. Kebijakan untuk sistem pengolahan sampah yang baik

3. Peningkatan penyediaan sarana prasarana/fasilitas untuk menunjang pengolahan sampah yang memadai
4. Kebijakan pengolahan sampah mulai dari lini pertama yaitu masyarakat, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Dari hasil melihat cara atau sistem pengolahan sampah di Waste4Change kami mengusulkan hal yang sama yang dilakukan Waste4Change dalam pengolahan sampah dan mengurai, mengolah, serta mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan dalam pemberian KIE oleh pemerintah tentang pengolahan sampah terhadap masyarakat DKI Jakarta. Karena dengan KIE (Konseling, Informasi dan edukasi) tersebut masyarakat lebih dapat menyerap serta dapat melakukan pemaksimalan pengolahan sampah. Dengan Konseling, maka apapun yang dikeluhkan masyarakat bisa tersampaikan kepada pemerintah terkait dengan pengolahan sampah tersebut. Lalu dengan informasi, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang membangun masyarakat untuk dapat mengolah sampah dengan baik dan benar, dan yang paling terakhir mengenai edukasi. Setelah masyarakat telah melakukan konseling serta penyampaian keluhan masyarakat, langkah selanjut nya adalah informasi yang berdampak kepada edukasi yang akan mereka lakukan terhadap pengolahan sampah itu sendiri.
2. Kebijakan pengolahan sampah mulai dari lini pertama yaitu masyarakat, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Setelah dilakukan pembekalan melalui KIE, langkah selanjut nya adalah pemerintah harus membuat kebijakan terkait dengan sanksi pengelolaan sampah supaya tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta mereka dapat melakukan pengelolaan sampah sehingga sampah tersebut dapat menjadi barang yang ternilai harga nya.

KESIMPULAN

Penumpukan sampah yang terjadi di Indonesia , membuat banyak permasalahan yang timbul. Hal tersebut juga disebabkan karena kurang nya informasi, edukasi serta ketegasan pemerintah dalam menegakkan kebijakan sampah ini. Mengelola sampah memang terdengar sedikit asing di telinga, bukan karena kita tidak mengenal konsep tersebut,

tetapi karena kita tidak menjalankannya dengan penuh kesadaran. Kita tidak pernah tahu dan peduli kemana sampah yang kita hasilkan dibawa dan dikelola; apakah sampah tersebut didaur ulang, atau menjadi bencana bagi orang lain. Bila mana pemerintah mampu tegas dalam menegakkan sampah, dan juga bekerjasama dengan masyarakat terkait dengan pengolahan sampah maka dengan perlahan namun pasti persoalan soal penumpukan sampah tidak lagi terjadi. Dengan pendidikan pengolahan yang dilakukan hal tersebut juga dapat menjadi lahan ekonomi bagi ibu rumah tangga maupun masyarakat lain nya bila mana masyarakat bijak dalam melakukan pengolahan sampah. Banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk mengurangi masalah sampah yang ada selama ini.

SARAN

Saran yang dapat diketengahkan pada tulisan ini mencoba untuk menyetuh pihak-pihak yang terkait, yaitu ;

Bagi pemerintah dan juga masyarakat harus melakukan kerjasama dan juga menjalin hubungan yang baik. Karena semua hal ataupun kebijakan tidak akan berjalan baik bila mana tidak ada kerjasama anantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank (ADB) dalam Zubaedi (2007 : 99-100)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 189.

Ismet Firdaus, Pengalaman Alquran tentang Pemberdayaan Dhuafa, (Ciputat: Dakwah Press UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 9

PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen, h. 34

Richard Heeks dalam LAN (2007:98)

Rogers dalam LAN (2007:115)

Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132)

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (1997:216)

Yogi dalam LAN (2007:115)